

**PARTISIPASI KELOMPOK TANI  
DALAM PROGRAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN  
DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) BILA WALANAE  
(STUDI KASUS DI DESA BENTENG LOMPOE KECAMATAN  
SABBANGPARU KABUPATEN WAJO)**



**OLEH**

**PEBRIANI PATANDEAN**

**M 111 02 026**

No. Dik.	16-8-07
Barang	Fak. Kehutanan
Uraian	1 ekis
Revisi	Hadiah
No. Revisi	26
No. Ang.	SRE KH07
	PAT-8



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN HUTAN  
FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2007**

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **Partisipasi Kelompok Tani dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bila Walanae (Studi Kasus di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo)**

Nama Mahasiswa : **Pebriani Patandean**

No Pokok : **M 111 02 026**

Program Studi : **Manajemen Hutan**

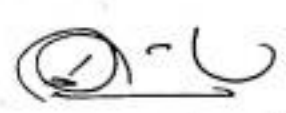
Skripsi ini Dibuat Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Kehutanan pada Jurusan Manajemen Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin

Menyetujui,  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

  
Ir. M. Asar Said Mahbub, MP  
Tanggal: 16-8-2007

Pembimbing II

  
Ir. H. Usman Arsyad, MS  
Tanggal: 16 Agustus 2007

Mengetahui,  
Ketua Komisi Pembimbing  
Jurusan Studi Manajemen Hutan  
Fakultas Kehutanan  
Universitas Hasanuddin

  
Ir. Budirman Bachtiar, MS  
Tanggal: 16 Agustus 2007



## ABSTRAK

**Pebriani Patandean (M 111 02 026). Partisipasi Kelompok Tani dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Bila Walanae (Studi Kasus Di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo), Dibawah bimbingan M. Asar Said Mahbub dan Usman Arsyad.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi kelompok tani dan mengetahui faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi partisipasi kelompok tani. Sifat dari penelitian ini adalah studi kasus, dengan melakukan pendekatan penelitian yaitu pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan selama 1 bulan yaitu bulan April sampai bulan Mei 2007, yang berlokasi di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo. Populasi penelitian adalah masyarakat petani yang tergolong dalam kelompok tani RHL yang berada di desa penelitian yang diambil dengan metode purposive sampling, dengan jumlah sampel penelitian adalah 30 responden. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan observasi langsung. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis distribusi frekuensi dan uji chi kuadrat (chi square).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang tingkat partisipasinya tinggi (23.33 %), tingkat partisipasi sedang (16.67 %) dan tingkat partisipasi rendah (60 %). Sementara itu faktor sosial ekonomi yang mempunyai hubungan yang nyata dengan partisipasi masyarakat adalah tingkat pendidikan (11,54), luas lahan (18,81) dan intensitas penyuluhan (10,73). Rendahnya partisipasi masyarakat tersebut disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang dilihat secara keseluruhan terhadap anggota kelompok tani dan rendahnya intensitas penyuluhan yang dilakukan oleh tenaga PPL.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas pimpinan dan penyertaannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ *Partisipasi Kelompok Tani dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Billa Walanae (Studi Kasus Di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo)*”

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Manajemen Hutan, pada Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini dapat terwujud karena adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada

1. **Bapak Ir. M. Asar Said Mahbub, MP** selaku pembimbing I dan **Bapak Ir. H. Usman Arsyad, MS** selaku pembimbing II yang telah bersedia dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
2. **Bapak Dr. Ir. Amran Achmad, M.Sc, Bapak Ir. H. Andi Mujetahid, MP dan Ibu Ir. Sitti Nuraeni, MP**, sebagai dosen penguji dari jurusan Manajemen Hutan atas masukan dan arahnya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. **Bapak Ir. H. Muh. Restu, MP**, selaku Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin.
4. **Bapak Prof. Dr. Ir. Baharuddin Nurkin, M.Sc** selaku penasehat akademik

5. **Seluruh dosen Pengajar dan Staf Pegawai administrasi** Fakultas Kehutanan Universitas Hasanuddin..
6. **Semua rekan-rekan mahasiswa kehutanan**, khususnya angkatan "02" yang banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. **Terkhusus dan teristimewa untuk ayahanda (alm) Drs. A.M. Patandean**, meskipun tidak bersama dengan penulis namun semua nasehatmu akan tetap teringat selamanya, dan untuk ibu tersayang **R.S. Palinggi**, atas segala jeri payah, dukungan, perhatian, dan kasih sayangnya serta doa yang tiada hentinya diberikan demi menyelesaikan studi penulis.
8. Untuk ketiga adik-adikku "**Anthon Patandean, Fernandel Patandean dan Calsy Patandean**" terimakasih atas semua dukungan, bantuan dan doanya sehingga penulisan skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.

Dalam skripsi ini akan ditemukan begitu banyak kekurangan disebabkan karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat berguna juga untuk penulisan skripsi selanjutnya. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menyumbangkan tambahan pengetahuan bagi yang membacanya.

Makassar, Agustus 2007

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGSAHAN.....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan dan Kegunaan.....	4
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Daerah Aliran Sungai .....	5
1. Pengertian DAS.....	5
2. Pengelolaan DAS .....	6
B. Konsep Partisipasi .....	7
C. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi.....	9
D. Jenis Partisipasi .....	12
1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan .....	12
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan .....	14
3. Partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi.....	14
E. Pentingnya Partisipasi.....	15
F. Rehabilitasi Hutan dan Lahan.....	18
G. Kelompok Tani.....	19

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	21
B. Metode Pengumpulan Data .....	21
C. Metode Analisis.....	22
D. Variabel Penelitian .....	24
1. Variabel Dependen.....	24
2. Variabel Independen .....	26
E. Konsep Operasional.....	29

### **BAB IV. KEADAAN UMUM LOKASI**

A. Keadaan Fisik Lokasi .....	31
1. Letak dan Luas .....	31
2. Iklim .....	32
B. Keadaan Sosial Ekonomi.....	34
1. Penduduk.....	34
2. Mata Pencaharian .....	35
3. Pendidikan.....	36
4. Sarana dan Prasarana.....	37
5. Tata Guna Lahan .....	37

### **BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Identitas Responden .....	39
1. Umur .....	39
2. Pendidikan Responden .....	41
3. Tanggungan Keluarga .....	42
4. Pendapatan Responden.....	43
5. Luas Lahan .....	44
6. Intensitas Penyuluhan.....	45
B. Partisipasi Masyarakat.....	46
1. Partisipasi dalam Perencanaan .....	46
2. Partipasi dalam Pelaksanaan .....	48
3. Partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi.....	49
4. Partisipasi Kelompok Tani dalam RHL .....	51

C. Hubungan antara Faktor Sosial Ekonomi dengan Partisipasi.....	52
<b>BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	58
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Hal
1.	Data Curah Hujan Bulanan (mm) Selama Sepuluh tahun Terahir di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo .....	18
2.	Jumlah Bulan Basah, Bulan Kering dan Bulan Lembab selama Sepuluh Tahun Terahir di Desa Benteng Lompoe kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo .....	19
3.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo .....	20
4.	Jumlah Kepala Keluarga Berdasarkan Mata Pencaharian Penduduk Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo .....	21
5.	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo .....	22
6.	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana yang Terdapat di Desan Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo .....	22
7.	Tata Guna Lahan di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo .....	23
8.	Distribusi Umur Petani Respoden pada Kegiatan rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo .....	24
9.	Distribusi Tingkat Pendidikan Petani Respoden pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo .....	25
10.	Distribusi Jumlah Tanggungan Keluarga Petani Respoden pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa benteng Lompoe Kecamatan sabbangparu Kabupaten Wajo .....	26

11.	Distribusi Tingkat Pendapatan Petani Responden pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.....	27
12.	Distribusi Luas Lahan Petani Responden di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.....	27
13.	Kalsifikasi Frekuensi Penyuluhan Responden di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.....	28
14.	Partisipasi Responden dalam Perncaanaan .....	29
15.	Partisipasi Responden dalaqm Pelaksanaan.....	30
16.	Partisipasi Responden Dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi .....	32
17.	Klasifikasi Partisipasi di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.....	33
18.	Hasil Analisis Hubungan antara Faktor Sosial Ekonomi dengan Partisipasi Kelompok Tani dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.....	34

## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Teks
1.	Data Skoring Tingkat Partisipasi Responden dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo
2.	Data Identitas Sosial Ekonomi Responden di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo
3.	Hasil Anslisis Hubungan antara Faktor Umur dengan Partisipasi Responden
4.	Hasil Analisis Hubungan antara Faktor Pendidikan dengan Partisipasi Responden
5.	Hasil Analisis Hubungan antara Faktor Tanggungan Keluarga dengan Partisipasi Responden
6.	Hasil Analisis Hubungan antara Faktor Pendapatan Responden dengan Partisipasi responden
7.	Hasil Analisis Hubungan antara Faktor Luas Lahan dengan Partisipasi Responden
8.	Hasil Analisis Hubungan antara Faktor intensitas Penyuluh Responden dengan Partisipas
9.	Sketsa Peta Lokasi Penelitian

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hutan merupakan aset bangsa yang berfungsi dalam hal perlindungan, keindahan, ekonomi dan fungsi sosial sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia. Pengelolaan sumberdaya hutan selama ini cenderung mengarah pada aspek ekonomi, sehingga berdampak pada penurunan potensi dan kualitas sumberdaya hutan. Kenyataan ini memberikan gambaran bahwa upaya pengelolaan hutan harus memperhatikan tiga aspek utama, yaitu aspek ekologi, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Hal ini sejalan dengan orientasi pembangunan kehutanan saat ini yang tidak bertumpu pada timber manajemen tetapi mengarah pada manajemen sumberdaya hutan.

Kebutuhan akan bahan baku hasil hutan berupa kayu maupun bukan kayu terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Sehingga ketersediaan lahan garapan tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Akibatnya kawasan hutan terus terdesak untuk pemenuhan lahan usaha tani, termasuk kawasan hutan di daerah aliran sungai. Terjadinya banjir, erosi dan kekeringan, disebabkan karena semakin meluasnya lahan kritis sebagai akibat pengelolaan yang tidak memperhatikan aspek kelestarian. Keadaan seperti ini menyebabkan kondisi sumberdaya hutan dan lahan semakin rusak yang mengarah kepada lahan kritis. Data terakhir mengindikasikan bahwa kawasan hutan dan lahan yang rusak di Kabupaten Wajo seluas 66.814,40 ha, dimana diantaranya 32.755,70 ha berada dalam kawasan hutan dan 34.058,70 ha berada di luar kawasan (BPDAS-Jeneberang, 2006).

Kerusakan hutan dan lahan yang telah terjadi mengakibatkan bencana alam seperti banjir, tanah longsor dan kekeringan yang dapat menyebabkan kegagalan panen. Penyebab utama terjadinya kegagalan tersebut adalah kerusakan lingkungan, terutama di wilayah hulu maupun hilir DAS sebagai daerah tangkapan air.

Desa Benteng Lompoe adalah salah satu desa yang dilalui oleh DAS Bila Walanae dan bersentuhan langsung dengan Danau Tempe yang dapat memberikan nilai yang sangat penting bagi masyarakat yang ada di sekitarnya seperti kegiatan perikanan air tawar, pertanian yakni pada kegiatan persawahan dan perkebunan, selain itu juga memberikan manfaat bagi transportasi lokal. Adapun permasalahan yang sering terjadi di Desa Benteng Lompoe adalah tanah longsor dan banjir yang hampir terjadi setiap tahun melanda desa.

Pengelolaan hutan yang lebih berorientasi kepada hasil kayu dan kebutuhan masyarakat akan lahan usaha cukup besar, akan menyebabkan kondisi sumberdaya hutan dan lahan semakin rusak, yang mengarah kepada meningkatnya lahan kritis. Oleh karena itu, kegiatan yang berkaitan dengan upaya untuk menanggulangi degradasi sumberdaya hutan dan lahan perlu ditingkatkan untuk menjamin kelestarian manfaat sumberdaya hutan. Salah satu alternatif yang dilakukan adalah kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik, maka partisipasi masyarakat perlu diperhatikan.

Conyer (1991), mengemukakan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan aktif individu atau kelompok masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi suatu kegiatan. Partisipasi dikatakan penting karena

partisipasi masyarakat merupakan suatu alat, guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Selain itu masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika mereka dilibatkan langsung dalam proses persiapan dan perencanaan karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek yang akan dilaksanakan dan masyarakat akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut.

Program pemerintah dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan selalu melibatkan masyarakat sekitar melalui system kelompok tani peserta RHL. Kelompok tani tersebut diberikan pembinaan oleh pemerintah dengan mengaktifkan penyuluh-penyuluh kehutanan setempat. Penyuluh kehutanan tersebut berupaya meningkatkan kapasitas para petani melalui bimbingan dan bantuannya yang intensif dan meningkatkan intensifikasi usaha tani sawah dan kebun masyarakat melalui pemberdayaan dan pengembangan lembaga-lembaga lokal yang ada, disamping itu tetap menggalakkan gerakan RHL secara optimal serta selalu melakukan penyuluhan akan pentingnya penyelamatan hutan secara efektif, tepat guna dan berhasil guna. Diharapkan melalui penyuluhan tersebut kelompok tani dapat menjalankan perannya sesuai harapan dalam RHL.

Partisipasi masyarakat sebagai pelaku program kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dalam setiap tahapan kegiatan merupakan suatu keharusan dan kebutuhan yang sudah saatnya untuk dilembagakan dengan pendekatan partisipatif. Salah satu lembaga yang ada di pedesaan yang sangat berperan dan sekaligus merupakan partner pemerintah dalam melaksanakan kegiatan

rehabilitasi hutan dan lahan adalah kelompok tani. Dengan terbentuknya kelompok tani maka diharapkan bisa membantu dalam keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu diadakannya penelitian tentang partisipasi kelompok tani terhadap kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Daerah Aliran Sungai Billa Walanae, khususnya di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.

### **B. Tujuan dan Kegunaan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi kelompok tani dan untuk mengetahui hubungan antara kondisi sosial ekonomi petani dengan tingkat partisipasi dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sekitar DAS Bila Walanae, khususnya di Desa Benteng Lompoe, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dan informasi untuk penyempurnaan kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan menjadi masukan bagi pemerintah Kabupaten Wajo untuk menumbuhkan, menggerakkan, dan mendorong partisipasi kelompok tani dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada masa yang akan datang.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Daerah Aliran Sungai

#### 1. Pengertian DAS

Daerah aliran sungai (DAS) adalah suatu kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografi yang menampung, menyimpan dan mengalirkan air hujan yang jatuh keatasnya kesuatu sungai utama yang bermuara dilaut atau didanau. Pemisah topografi adalah punggung bukit/gunung . Pemisah topografi atau igis memisahkan suatu DAS dengan DAS lainnya. (Paembonan 1982).

DAS didefenisikan pula sebagai suatu wilayah daratan yang secara topografik dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya kelaut melalui sungai. Wilayah tersebut dinamakan Daerah Tangkapan Air (DTA) yang merupakan suatu ekosistem dengan unsur utamanya terdiri atas sumber daya alam ( tanah, air dan vegetasi) dan sumber daya manusia sebagai pemanfaat sumber daya alam (Asdak, 1995).

Daerah Aliran Sungai adalah suatu daerah tertentu yang bentuk dan sifat alamnya sedemikian rupa, sehingga merupakan kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang melalui daerah tersebut dalam fungsinya untuk menampung air yang berasal dari curah hujan dan sumber air lainnya dan kemudian mengalirkannya melalui sungai utamanya. Satu DAS dipisahkan dari wilayah lain di sekitarnya (DAS-DAS lain) oleh pemisah topografi, seperti punggung



perbukitan dan pegunungan. Di dalamnya terjadi interaksi antara faktor-faktor biotik, nonbiotik dan manusia (Suripin, 2002)

## 2. Pengelolaan DAS

Pengelolaan DAS adalah upaya manusia di alam mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam daerah aliran sungai dan segala aktifitasnya, dengan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan (DEPHUT, 2001).

Menurut Sulasdi dalam Anna (2001), sungai sebagai komponen utama DAS mempunyai potensi seimbang yang ditunjukkan oleh daya guna sungai tersebut antara lain untuk pertanian, energi dan lain-lain. Sungai juga mampu mengakibatkan banjir, pembawa sedimentasi, dan pembawa limbah. Oleh karena itu pengelolaan DAS ditujukan untuk memperbesar pemanfaatannya dan sekaligus memperkecil dampak negatifnya.

Pengelolaan DAS mempunyai arti sebagai pengelolaan dan alokasi sumberdaya alam di daerah aliran sungai termasuk pencegahan banjir dan erosi serta perlindungan nilai keindahan yang berkaitan dengan sumberdaya alam, termasuk dalam pengelolaan DAS adalah identifikasi keterkaitan antara tata guna lahan, tanah dan air dan keterkaitan antara tata guna lahan, tanah dan air dan keterkaitan antara daerah hulu dan hilir suatu DAS. Pengelolaan DAS perlu mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan yang beroperasi di dalam dan di luar daerah aliran sungai yang bersangkutan (Asdak, 1995).

## **B. Konsep Partisipasi**

Istilah partisipasi pada prinsipnya mengandung konotasi yang sama dengan peran serta yaitu mengambil bagian atau peranan dalam proses pengolahan bagian-bagian tertentu sehingga partisipasi dimaksudkan sebagai ikut sertanya masyarakat memberikan dukungan positif terhadap rencana dan pelaksanaan program pembangunan. Defenisi partisipasi yang berlaku dikalangan perencana dan perencana pembangunan adalah kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang dirancang dan ditentukan tujuannya oleh pemerintah. Defenisi lain dari partisipasi adalah kerjasama antara rakyat dan pmerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan (Soestrisno, 1995).

Partisipasi oleh banyak ahli dikaitkan dengan bagaimana upaya mendukung program pemerintah dan upaya-upaya yang pada awal dan konsep pelaksanaannya berasal dari pemerintah. Seperti dikemukakan Raharjo (1999), yang mengungkapkan bahwa partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam program pemerintah. Dan Adjid (1985), mengartikan peran serta tidak hanya pengertian di tingkat lokal seperti turut serta, bersama atau individu, dalam proyek pemerintah atau tidak hanya dalam hubungan produksi, pengambilan keputusan dan pelaksanaan, tetapi harus lebih luas. Peran serta harus meliputi segenap kehidupan masyarakat dalam segala bentuk melalui komunikasi sosial.

Sihombing (1980) mengemukakan bahwa partisipasi adalah keturut sertaan setiap orang dalam setiap upaya perencanaan, pengawasan, pelaksanaan dalam menguasai dan memelihara alam, bukan sekedar melaksanakan apa yang telah orang (kelompok) lain rencanakan dan putuskan. Pengertian partisipasi tersebut berakar pada pemahaman bahwa setiap makhluk yang disebut manusia itu adalah pemilik dan ahli waris yang sah dari dunia. Sedangkan, menurut Karyawan dkk (1996), partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh pendapatan petani, pendidikan dan pengalaman usaha tani, serta ketersediaan tenaga kerja produktif di dalam keluarga petani.

Seseorang akan berpartisipasi apabila menyangkut adanya kebutuhan akan kepuasan untuk mendapatkan keuntungan dan dapat meningkatkan statusnya. Mengenai siapa yang berpartisipasi dapat meliputi seluruh masyarakat dan secara khusus adalah mereka yang akan menerima manfaat dari suatu kegiatan. Partisipasi tersebut dapat bersifat langsung dan tidak langsung, dengan menggunakan wakil-wakil. Cara berpartisipasi langsung hanya dapat terjadi di tingkat lokal (Cohen dan Uphoff, 1997 *dalam* Imran, 2003).

Harjonigeno (1991), mengemukakan bahwa beberapa arti penting partisipasi masyarakat adalah :

1. Dapat memberi informasi kepada pemerintah adanya masalah khusus dan konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan yang direncanakan pemerintah. Informasi ini merupakan masukan yang dapat meningkatkan mutu keputusan dan tindakan yang akan diambil.

2. Dapat meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan, disisi lain akan banyak mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan diantara masyarakat itu sendiri.
3. Membantu dalam perlindungan hukum, hal ini sejalan dengan keberatan-keberatan yang digunakan masyarakat dan konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul, sehingga dapat mengurangi kemungkinan timbulnya pertentangan di antara masyarakat.
3. Mendemokratisasikan pengambilan keputusan, hal ini mengandung arti memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anggota masyarakat untuk menyatakan pendapat dan kehendaknya.

### **C. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi**

Partisipasi masyarakat terwujud karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Susanto (1997), mengemukakan bentuk partisipasi dan segi motivasinya, partisipasi masyarakat terjadi atau terbentuk karena

- a. Motivasi partisipasi adalah kesadaran, yaitu partisipasi yang timbul karena kehendak dari pribadi anggota masyarakat. Hal ini dilandasi oleh dorongan yang timbul dari hati nurani sadar bahwa pembangunan tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka juga. Karena apa yang mereka lakukan bukan karena terpaksa atau ikut-ikutan, tetapi karena kesadaran diri mereka sendiri. Partisipasi bentuk inilah yang sesungguhnya sangat diharapkan dapat berkembang dalam masyarakat.
- b. Partisipasi dalam bentuk ikut-ikutan, hanya didorong oleh rasa solidaritas diantara sesama anggota masyarakat. Apalagi yang memulai adalah

pimpinan mereka, sehingga keikutsertaan mereka bukan karena dorongan hati sendiri, tetapi merupakan perwujudan kebersamaan saja yang merupakan kondisi sosial budaya masyarakat.

- c. Partisipasi dalam bentuk terpaksa atau takut biasanya terjadi karena adanya perintah yang kaku dari atasan, sehingga masyarakat seakan-akan terpaksa untuk melaksanakan rencana yang telah ditentukan.

Selanjutnya menurut Mubyarto dan Kartodirdjo (1994), menyatakan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi partisipasi adalah :

1. Faktor lingkungan fisik, mencakup variabel kesuburan tanah, jenis tanah, iklim, topografi dan orbitasi daerah.
2. Faktor sosial ekonomi mencakup variabel jenis pekerjaan tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, status pemilikan rumah/lahan, jumlah tanggungan keluarga, jumlah tenaga kerja keluarga, dan tingkat kesehatan.
3. Faktor sosial budaya mencakup variabel norma, nilai, kepercayaan, pengetahuan, sikap, status pernikahan, jenis kelamin.
4. Faktor teknologi, mencakup variabel cara-cara dan alat yang digunakan dan pelayanan-pelayanan penyuluhan.
5. Faktor kebijakan pemerintah, mencakup variabel sifat koordinatif, kepemimpinan lembaga sosial, pendekatan untuk memotivasi masyarakat dan tingkat kebebasan untuk menyatakan pendapat dan keinginan-keinginan.



Menurut Goldsmith dan blustain *dalam* Ndraha (1987), bahwa faktor yang turut berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat :

1. Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal atau sudah ada dalam masyarakat yang bersangkutan.
2. Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada kegiatan masyarakat yang bersangkutan.
3. Manfaat yang diperlukan melalui partisipasi itu dapat memenuhi kepentingan masyarakat setempat.
4. Dalam partisipasi terjadi adanya kontrol keberhasilan yang dilakukan oleh masyarakat.

Adjid (1992), mengemukakan bahwa untuk menggerakkan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam suatu kegiatan diperlukan adanya beberapa faktor yang memungkinkan mereka terdorong untuk berpartisipasi jika hasil dari partisipasi tersebut dapat dinikmati langsung dan memberi keuntungan bagi mereka sendiri. Selanjutnya dijelaskan bahwa ditinjau dari segi motivasi, partisipasi masyarakat terjadi karena takut, ikut-ikutan atau karena kesadaran mereka sendiri.

#### **D. Jenis Partisipasi**

Menurut Mishra (1984) *dalam* Imran (2003), jenis partisipasi dalam tahapannya dibagi menjadi 4 jenis yaitu :

1. Partisipasi dalam perencanaan program
2. Partisipasi dalam pelaksanaan program
3. Partisipasi dalam penerimaan manfaat program, dan
4. Partisipasi dalam pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan.

##### **1. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan**

Perencanaan adalah suatu proses penentuan tindakan yang berkenaan dengan prakiraan tujuan dan target yang hendak dicapai, biaya, tenaga, waktu dan alat yang diperlukan dalam kegiatan tersebut.

Mubyarto (1988), mengemukakan bahwa partisipasi dalam perencanaan menyangkut partisipasi dalam pengambilan keputusan untuk pembuat kebijakan. Keputusan tersebut menurut Cohen dan Uphoff (1977) dalam Slamet (1994), perencanaan dapat dibedakan atas tiga keputusan dasar, keputusan yang sementara berlangsung dan keputusan operasional.

Keputusan dasar berkenaan dengan tahap identifikasi proyek (tahap persiapan). Keputusan sementara berlangsung berkenaan dengan penetapan lokasi proyek sesuai dengan perkembangan lokal. Keputusan operasional berkenaan dengan penetapan criteria pelaksanaan, pemilihan pemimpin kegiatan tertentu, penentuan cara-cara pelaksanaan secara teknis dan kegiatan teknis lainnya.

Kuswata (1993), mengemukakan secara rinci kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam proses perencanaan adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi masalah, kebutuhan, sumber-sumber yang tersedia yang dapat dilibatkan dan kondisi-kondisi lingkungan yang berpengaruh.
2. Pemilihan dan penentuan jenis kebutuhan dan pemilihan prioritas masalah yang akan diselesaikan.
3. Perumusan dan penilaian kondisi-kondisi lingkungan yang berpengaruh
4. Penentuan lokasi proyek
5. Penentuan tujuan dan target yang akan dilaksanakan
6. Penentuan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan
7. Penentuan personal pelaksana untuk setiap jenis kegiatan
8. Perhitungan biaya dan penentuan sumber-sumber yang mungkin diperoleh
9. Penentuan bahan-bahan dan alat-alat yang diperlukan
10. Penentuan pemimpin untuk setiap jenis kegiatan
11. Distribusi tugas pada personal pelaksana untuk setiap kegiatan
12. Penentuan cara-cara pelaksanaan teknis lapangan
13. Menetapkan jadwal pelaksanaan kegiatan

Selain itu jenis partisipasi yang dimaksud adalah partisipasi secara partisipasi secara langsung dan bukan melalui perwakilan. Partisipasi semacam ini hanya mungkin dilakukan ditingkat desa. Olehnya itu, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan memiliki arti apabila dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan bottom-up. Pendekatan ini memungkinkan pemilihan alternatif atas prioritas kepentingan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam



pendekatan ini akan lebih langsung karena masyarakat lebih dapat memahami hubungan langsung antara perbuatan mereka dengan hasil-hasil nyata dari partisipasi mereka.

## **2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kegiatan**

Ada beberapa cara masyarakat untuk terlibat dalam implementasi kegiatan pembangunan. Menurut Misrah (1984) *dalam* Imran (2003), implementasi kegiatan terdiri dari beberapa cara yaitu :

1. Partisipasi melalui kontribusi sumber-sumber yang dibutuhkan oleh program pembangunan.
2. Partisipasi melalui usaha-usaha administrasi dan koordinasi.

Partisipasi melalui kontribusi sumber-sumber dapat berupa :

Penyediaan tenaga kerja, uang, materi/benda, dan informasi yang dihubungkan oleh program pembangunan. Partisipasi melalui kegiatan administrasi dan koordinasi dapat berupa pendanaan kegiatan dan kemajuannya melakukan kontak langsung dengan unsur-unsur terkait, menjadi anggota dewan penasehat dan pengambil keputusan.

## **3. Partisipasi Masyarakat dalam Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan adalah kegiatan pengumpulan informasi secara terus menerus mengenai input-output program, sasaran, kondisi-kondisi, dan aktivitas program, serta dampaknya. Tujuan pemantauan adalah untuk mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan yang akan mempengaruhi keberhasilan program pembangunan. Berkenaan dengan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL),

unsur-unsur yang dipantau meliputi : Perkembangan fisik dan non fisik antara lain fisik tanaman, dan sarana prasarana yang menunjang kegiatan RHL. Sementara untuk nonfisiknya termasuk penggunaan biaya, bahan dan waktu yang telah ditentukan, motivasi, sikap dan perilaku masyarakat, kontribusi setiap kegiatan terhadap pendapatan masyarakat, dan masalah-masalah yang ditimbulkan dalam pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi adalah suatu proses perencanaan informasi untuk pertimbangan, menarik kesimpulan dan membuat keputusan mengenai hasil-hasil akhir kegiatan. Sehubungan dengan itu, maka tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui seberapa besar tujuan yang telah direncanakan dapat tercapai dan bagaimana dampak-dampak yang ditimbulkan baik secara fisik, biologis maupun sosial. Karena itu, kegunaan evaluasi dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta memberikan masukan dalam penyempurnaan rencana kegiatan yang akan datang.

#### **E. Pentingnya Partisipasi Masyarakat**

Terdapat 3 alasan utama mengapa partisipasi masyarakat penting (Conyers,1981). *Pertama* , partisipasi masyarakat merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. *Kedua*, masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan, jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. *Ketiga*, partisipasi merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan.

Pentingnya pelebagaan partisipasi masyarakat telah mengindikasikan banyak keuntungan seperti yang telah dilakukan beberapa negara maju. Pelebagaan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di desa telah banyak membantu aparat desa, sehingga beturan-betulan seperti pemilihan tanah, penentuan lokasi suatu proyek, ataupun pelaksanaan kegiatan yang sifatnya swadaya dapat ditanggulangi bersama.

Tjokroamidjoyo (1987), memberikan beberapa dasar pbenaran tentang pentingnya partisipasi, antara lain

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan dan partisipasi adalah akibat proses tersebut.
2. Partisipasi menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi tentang aspirasi kebutuhan dan kondisi daerah.
3. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemampuan pribadi untuk ikut serta dalam menentukan keputusan yang menyangkut masyarakat..
4. Memperluas kawasan proyek atau program pembangunan.
5. Partisipasi merupakan cara efektif membangun kemampuan masyarakat untuk mengelola program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah.
6. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokrasi individual

Alidinar (1986), mengemukakan arti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah :

1. Partisipasi mencerminkan penerimaan masyarakat terhadap program pembanguna yang dilaksanakan.

2. Partisipasi dapat menimbulkan saling pengertian, kebersamaan (kesepahaman) antar golongan dalam masyarakat (strata sosial).
3. Partisipasi dapat mengembangkan keterampilan bagi masyarakat.
4. Partisipasi mencerminkan seorang tidak lagi sebagai objek dalam masyarakat melainkan sebagai subyek yang ikut bertanggung jawab dalam pembangunan.

Sallatang (2002), mengemukakan bahwa pentingnya partisipasi masyarakat sangat berkaitan dengan peran yang dimainkan oleh masyarakat dalam pembangunan, karena peran tersebut akan memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat. Semakin besar peran yang dimainkan maka sumber pendapatan yang dihasilkan semakin besar pula, demikian pula sebaliknya semakin kecil peran yang dimainkan maka pendapatan yang dihasilkan semakin kecil pula. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan bukan saja memperoleh pendapatan tetapi juga mewarisi nilai-nilai pembangunan antara lain :

1. Harga diri dan percaya diri
2. Keberanian untuk mengambil resiko
3. Etos kerja yang semakin tinggi
4. Ketabahan menderita dan keuletan berusaha.
5. Ketangguhan kepribadian dalam menghadapi perubahan.

Menurut Tjokromidjojo (1995), mengemukakan disatu pihak partisipasi penting bagi pembangunan dan bahkan menjadi salah satu tujuan pembangunan itu sendiri. Yakni terlibatnya dan tergeraknya seluruh masyarakat dalam proses pembangunan secara berencana sesuai dengan arah dan strategi yang telah ditetapkan melalui suatu bentuk partisipasi dalam sistem politik. Dipihak lain,

proses pembanguna itu sendiri diharapkan akan membutuhkan perluasan partisipasi, misalnya dalam pembangunan terjadi perluasan kesempatan kerja.

#### **F. Rehabilitasi Hutan dan Lahan**

Menurut undang-undang Nomor 41 tahun 1999 pasal 40 disebutkan bahwa Rehabilitasi Hutan dan Lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan perannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga (Dephut, 1999). Selanjutnya dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 20/Kpts-11/2002 tentang pola umum dan standar serta kriteria Rehabilitasi Hutan dan Lahan dijelaskan bahwa rehabilitasi hutan dan lahan merupakan sistem pengelolaan hutan dan lahan yang ditempatkan pada kerangka daerah aliran sungai (Dephut, 2001)

Sasaran rehabilitasi hutan dan lahan adalah lahan-lahan yang dikategorikan kritis, yakni lahan yang keadaan fisiknya sedemikian rupa sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara optimal, sesuai dengan peruntukannya baik sebagai media produksi maupun sebagai pengatur tata air. Lahan tersebut terdiri atas tanah gundul/kosong, padang alang-alang, tanah yang kedalamannya sangat tipis, dan tingkat erosinya melebihi batas yang diperkenankan (Paembonan, 1998).

Melalui kegiatan rehabilitasi lahan, akan memberikan keuntungan tidak saja secara ekonomi bagi masyarakat yang menjadi pelaksana kegiatan, namun juga bermanfaat untuk perbaikan ekologi. Dengan demikian perbaikan ekologi akan

memungkinkan bagi tumbuhnya jenis-jenis tumbuhan baru secara alami, sehingga meningkatkan penutupan lahan dan menurunkan erosi (Triwilaida dkk., 1996)

Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam ligkungannya dan yang ditetapkan pemerintah sebagai hutan. Perambahan hutan yang dilakukan masyarakat secara optimal karena banyaknya lahan produktif yang berubah menjadi lahan kritis. Lahan kritis merupakan bidang tanah yang tidak produktif dan kurang memiliki daya dukung bagi pertumbuhan tanaman. Salah satu upaya untuk memulihkan lahan kritis yaitu melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang merupakan suatu usaha yang dilakukan baik fisik maupun vegetatif guna memulihkan nilai dan fungsi hutan serta lingkungannya, akibat mengalami kerusakan dari beberapa macam gangguan (Zain, 1998).

### **G. Kelompok Tani**

Kelompok (Tani) yaitu dua orang atau lebih yang saling berhubungan (interelasi), saling mempengaruhi (interaksi) antara anggota-anggotanya dalam bahu-membahu di dalam melaksanakan tujuan kelompok tersebut (Dephut, 1992). Sedangkan menurut Polak (1997), kelompok tani adalah kumpulan dua orang petani atau lebih yang menjalin hubungan satu sama lain dan bersifat sebagai suatu struktur dan bekerjasama untuk suatu kepentingan di dalam mencapai tujuan bersama.

Kelompok tani merupakan salah satu bentuk organisasi yang didalamnya termuat aturan-aturan yang disepakati oleh para anggotanya. Pembentukan kelompok tani merupakan salah satu upaya mengkoordinasikan individu-individu untuk bekerja sama dalam mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan (Sukdan, 2004)

Badrun (1993) mengartikan kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan dan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi dan budaya), keakraban dan keserasian yang dipimpin oleh seorang ketua dengan jumlah anggota minimum 20 orang dan maksimum disesuaikan dengan jenis usaha tani dan kondisi setempat.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian dilaksanakan pada bulan April sampai Mei 2007 dilokasi kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

#### **B. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi beberapa tahap yaitu :

##### **1. Orientasi lapangan**

Orientasi lapangan dilakukan sebagai studi pendahuluan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran situasi dan kondisi objek/areal penelitian.

##### **2. Penetapan sampel**

Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan menggunakan tehnik purposive sampling dimana dari populasi akan dipilih tiga kelompok tani. Dari setiap kelompok tani sampel akan dipilih lagi sepuluh anggota kelompok tani sehingga total responden sebanyak 30 orang.

##### **3. Pengumpulan data**

Data-data yang dikumpulkan untuk keperluan penelitian berupa:

###### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh dengan melakukan observasi langsung dilapangan dan melakukan wawancara dengan petani responden melalui daftar pertanyaan (kuisisioner) yang telah disediakan yang



meliputi : identitas responden, luas pemilikan lahan, keterlibatan petani dalam tahap perencanaan kegiatan RHL, pelaksanaan kegiatan RHL dan keterlibatan masyarakat pada tahap monitoring dan evaluasi kegiatan RHL.

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh dari lembaga atau instansi yang terkait dan laporan-laporan yang terkait dengan penelitian ini.

### **C. Metode Analisis**

Data primer yang diperoleh dari lapangan terlebih dahulu dilakukan editing dengan maksud untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi lapangan. Kemudian pemasukan data-data yang telah diolah akan dianalisis dengan menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif dan Deskriptif Kuantitatif.

#### **1. Analisis Deskriptif Kualitatif**

Analisis ini akan mendeskripsikan kegiatan masing-masing kelompok tani serta untuk mengetahui faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi partisipasi anggota kelompok tani dalam kegiatan RHL.

#### **2. Analisis Deskriptif Kuantitatif**

- Rancangan analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan distribusi frekuensi dengan tabulasi silang dari pengolahan data yang diperoleh melalui wawancara. Untuk mengukur tingkat partisipasi suatu kelompok tani digunakan skala Likert yang digolongkan berdasarkan kategori tinggi, sedang dan rendah.

Untuk menguji ada tidaknya tingkat hubungan variable faktor sosial ekonomi ( umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga dan pendapatan usaha tani) dengan partisipasi anggota Kelompok Tani, digunakan analisis Chi-square ( $X^2$ ) dengan rumus sebagai berikut : (Sudjana, 1996)

$$X^2 = \sum \frac{(fo - fh)^2}{fh}$$

dimana :  $X^2$  = Chi - Kuadrat

$fo$  = Frekuensi yang diobservasi

$fh$  = Frekuensi yang diharapkan

Pengujian keberhasilan hubungan antara tingkat partisipasi masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi, dilakukan dengan membandingkan nilai  $X^2$ -*hitung* dengan  $X^2$ -*tabel* dengan kriteria sebagai berikut :

1. Jika  $X^2$ -*hitung* lebih besar dari  $X^2$ -*tabel* berarti variabel sosial ekonomi mempunyai hubungan yang nyata dengan tingkat partisipasi masyarakat.
2. Jika  $X^2$ -*hitung* lebih kecil dari  $X^2$ -*tabel* berarti variabel sosial ekonomi mempunyai hubungan yang tidak nyata dengan tingkat partisipasi masyarakat .

## D. Variabel Penelitian

### 1. Variabel Dependen

#### a. Partisipasi Kelompok Tani

Bentuk keikutsertaan masyarakat petani di sekitar areal RHL secara aktif dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dengan indikatornya adalah

1. Keterlibatan dalam proses Perencanaan
2. Keterlibatan dalam proses pelaksanaan
3. Keterlibatan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi

Indikator yang digunakan adalah :


1. Rendah = 1, dengan jumlah skoring = <20 )
2. Sedang = 2, dengan jumlah skoring = 20 – 25)
3. Tinggi = 3, dengan jumlah skoring = > 25 )

#### b. Partisipasi Kelompok Tani dalam Perencanaan

Bentuk keterlibatan masyarakat petani dalam kegiatan perencanaan RHL yang mencakup beberapa indikator, yaitu :

1. Keterlibatan dalam kegiatan survei lapangan pada kelompok tani
2. Keterlibatan dalam pemberian informasi kegiatan pada kelompok tani
3. Keterlibatan dalam mengajukan usul dan saran yang diajukan pada kelompok tani.

Indikator di atas dapat diukur dengan menggunakan kategori yaitu

- 
1. Rendah = 0 – 5 x ( < 50% ) terlibat dalam kegiatan setiap tahun.
  2. Sedang = 6 – 9 x ( 50 % - 75 % ) terlibat dalam kegiatan setiap tahun.
  3. Tinggi = 10 – 12 x ( 76 % - 100 % ) terlibat dalam kegiatan setiap tahun.

c. Partisipasi Kelompok Tani dalam Pelaksanaan

Bentuk keterlibatan masyarakat petani dalam kegiatan perencanaan

RHL yang mencakup sebagai berikut :

1. Keterlibatan dalam pemberian sumbangan pikiran pada kelompok lain.
2. Keterlibatan dalam pemberian sumbangan tenaga pada kelompok lain.
3. Keterlibatan dalam pemberian sumbangan materi/uang per kelompok tani.

Indikator di atas dapat diukur dengan menggunakan kategori yaitu

1. Rendah = 0 – 5 x ( < 50% ) terlibat dalam kegiatan setiap tahun.
2. Sedang = 6 – 9 x ( 50 % - 75 % ) terlibat dalam kegiatan setiap tahun.
3. Tinggi = 10 – 12 x ( 76 % - 100 % ) terlibat dalam kegiatan setiap tahun.

d. Partisipasi Kelompok Tani dalam Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

Bentuk keterlibatan masyarakat petani dalam pemantauan dan evaluasi kegiatan RHL, dengan indikator sebagai berikut :

1. Pemantauan (monitoring) pelaksanaan kegiatan pada kelompok tani
2. Evaluasi kegiatan pada kelompok tani.

Indikator di atas dapat diukur dengan menggunakan kategori yaitu

1. Rendah = 0 – 5 x ( < 50% ) terlibat dalam kegiatan setiap tahun.
2. Sedang = 6 – 9 x ( 50 % - 75 % ) terlibat dalam kegiatan setiap tahun.
3. Tinggi = 10 – 12 x ( 76 % - 100 % ) terlibat dalam kegiatan setiap tahun.

## 2. Variabel Independen

Menurut Ridwan (2002) dan Rhommy Rheynald (2002), dalam menentukan partisipasi masyarakat, maka ada beberapa indikator yang digunakan yaitu :

a. Umur

Umur adalah usia mulai dari tahun kelahiran masyarakat petani sampai pada saat penelitian dimulai dengan menyesuaikan umur pada kartu penduduk yang masih produktif dalam menggarap lahan terutama sektor pertanian. Kategori umur yang digunakan adalah

1. Kelompok umur produktif muda 15 – 34 tahun
2. Kelompok umur produktif tua 35 -54 tahun
3. Kelompok umur yang tidak produktif Umur 54 tahun keatas.

b. Tingkat pendidikan

Yang dimaksud dengan tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan formal yang telah diperoleh seseorang yang diukur lamanya waktu yang diikuti, atau bentuk pendidikan yang sifatnya informal baik kursus dan pelatihan. Indikator ini diukur dengan menggunakan standar sebagai berikut

1. Rendah : < SD (termasuk buta huruf)
2. Sedang : SMP – SMA
3. Tinggi : Perguruan Tinggi (PT)

c. Tingkat Pendapatan Per tahun

Jumlah penghasilan dari suatu keluarga yang biasanya dinilai dengan hasil-hasil produksi pertanian yang diusahakan secara bersama untuk seluruh anggota keluarga yang tinggal dalam satu atap yang dihitung dalam rupiah per tahun. Indikator yang diukur dengan menggunakan standar, yaitu

1. Rendah : < Rp. 5.000.000,- per tahun
2. Sedang : Rp 5.000.000 – Rp 9.000.000,- per tahun
3. Tinggi : > Rp 9.000.000,- per tahun

d. Luas Lahan Garapan

Luas pemanfaatan lahan yang diusahakan dan digarap oleh masyarakat petani untuk mengolah produktifitas usaha tani (pertanian) dalam satuan hektar. Indikator yang digunakan pada kategori berikut adalah :

1. Rendah : <0,5 hektar
2. Sedang : 0,5 – 1,5 hektar
3. Tinggi : > 1,5 hektar

e. Intensitas Penyuluhan

Banyaknya (frekuensi kehadiran) masyarakat petani mengikuti penyuluhan dan pertemuan kelompok tani yang dilaksanakan oleh PPL dalam rangka produktifitas pertanian dan pemanfaatan lahan. Indikator yang digunakan adalah

1. Rendah : Tidak terlibat dalam kegiatan setiap tahun
2. Sedang : 1 – 2x terlibat dalam kegiatan setiap tahun
3. Tinggi : > 2x terlibat dalam kegiatan setiap tahun

f. Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan keluarga adalah banyaknya anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah dengan responden atau berada di luar rumah dan menjadi tanggung jawab responden.

Indikator yang digunakan adalah

1. Rendah : 0 – 2 orang
2. Sedag : 3 – 5 orang
3. Tinggi : > 5 orang

## F. Defenisi Operasional

Untuk menuntun penelitian dan untuk menyamakan persepsi dengan pihak lain, maka perlu ditetapkan defenisi operasional dan pengukuran sebagai berikut :

1. **Partisipasi Masyarakat** adalah peranserta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan RHL.
2. **Kelompok Tani** adalah suatu perkumpulan petani yang anggotanya mempunyai kesamaan kepetingan, kesamaan kondisi lingkungan baik sosial, ekonomi, budaya maupun sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, keakraban dan keserasian yang memiliki kehendak yang sama untuk melakukan upaya yang sama untuk melakukan upaya pelestarian SDA yang dimilikinya.
3. **RHL** adalah kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dilakukan oleh pemerintah baik itu yang berhubungan dengan dengan reboisasi, penghijauan dan semacamnya yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi lahan kritis dengan melibatkan kelompok tani/masyarakat didalam maupun diluar kawassan hutan.
4. **Karakteristik Sosial Ekonomi** adalah tingkat kondisi sosial ekonomi responden yang terdiri dari umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, dan pendapatan usaha tani.
5. **Umur Petani** adalah diperhitungkan mulai dari tahun kelahiran responden sampai pada saat penelitian dilaksanakan yang dinyatakan dalam tahun.



6. **Tingkat Pendidikan** adalah pendidikan formal yang diikuti oleh responden melalui pendidikan sekolah yaitu tidak sekolah, SD, SLTP, SLTA, Akademi, dan Perguruan Tinggi.
7. **Jumlah Tanggungan Keluarga** adalah banyaknya orang yang menjadi tanggungan dan dibiayai oleh responden.
8. **Pedapatan Usaha Tani** adalah pendapatan bersih total dari usaha tani yang berhubungan dengan kegiatan pertanian yang dilakukan di areal pertanian mereka.
9. **DAS** adalah suatu wilayah daratan yang menerima, menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian mengalirkan ke laut/danau melalui sungai utama.
10. **Tingkat Partisipasi** adalah tingkat/intensitas keikutsertaan responden dalam kegiatan pengelolaan rehabilitasi lahan dan hutan yang diukur berdasarkan jumlah frekuensi dari bentuk, jenis/tipe dan tahapan dalam partisipasi.
11. **Lahan Kritis** adalah bidang tanah yang tidak produktif dan kurang memiliki daya dukung bagi pertumbuhan tanaman.

#### IV. KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN

##### A. Keadaan Fisik Wilayah Desa

###### 1. Letak dan Luas

Secara administratif, Desa Benteng Lompoe berada pada wilayah Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah  $\pm 8,22 \text{ km}^2$  atau 6,19% dari total luas wilayah Kecamatan Sabbangparu. Desa Benteng Lompoe membawahi dua dusun yaitu Dusun Massappa dan Dusun Tobako.

Adapun batas-batas wilayah desa sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tempe
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pasaka dan Kecamatan Tempe
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Danau Tempe
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Ujung Pero dan Desa Pallingmae

Desa Benteng Lompoe terletak  $\pm 205 \text{ km}$  dari Propinsi Sulawesi Selatan,  $\pm 3 \text{ km}$  dari ibukota kabupaten dan  $\pm 7 \text{ km}$  dari jalan poros Soppeng-Wajo.

Secara umum kondisi topografi di Desa Benteng Lompoe adalah datar dengan ketinggian  $< 500 \text{ meter}$  dari permukaan laut.

## 2. Iklim

Keadaan iklim pada setiap daerah berbeda-beda. Untuk menentukan tipe iklim suatu daerah adalah bersumber pada data curah hujan yang ada.

Data curah hujan sepuluh tahun terakhir di Desa Benteng Lompoe dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Curah Hujan Bulanan (mm) Selama Sepuluh Tahun Terakhir (1997-2006) di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1997	20	29	250	186	104	36	45	-	-	-	73	76
1998	110	148	174	638	372	238	818	232	126	109	242	66
1999	116	41	61	255	307	183	93	63	41	480	102	278
2000	75	103	318	124	322	453	69	138	64	171	280	85
2001	578	266	13	88	34	305	29	-	235	87	328	434
2002	481	59	236	136	543	306	7	0	0	0	105	173
2003	92	23	169	332	202	518	310	233	216	197	186	-
2004	128	26	176	398	356	52	223	0	12	0	213	14
2005	5	211	119	209	454	43	87	15	12	237	223	64
2006	5	211	6	70	310	892	23	1	0	-	210	134

Sumber: Stasiun Klimatologi Kelas I Maros, 2007

Keterangan : - Tidak ada data  
: 0 Curah hujan < 50 mm

Berdasarkan data curah hujan pada Tabel 1 di atas, dapat ditentukan jumlah bulan basah, bulan lembab dan bulan kering selama sepuluh tahun terakhir di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Jumlah Bulan Basah, Bulan Kering dan Bulan Lembab selama Sepuluh Tahun Terakhir di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo (1997-2006).

No	Tahun	Jumlah Bulan Basah (> 100 mm/bln)	Jumlah Bulan Lembab ( mm- 100 mm) /bln	Jumlah Bulan Kering (< 60 mm/bln)
1	1997	3	2	4
2	1998	11	1	-
3	1999	7	3	2
4	2000	8	4	-
5	2001	6	2	3
6	2002	7	-	5
7	2003	9	1	1
8	2004	6	-	6
9	2005	6	2	4
10	2006	5	1	6
Jumlah		68	16	36
Rata-Rata		6.8	2	3.8

Sumber : Hasil Perhitungan Berdasarkan Klasifikasi Iklim menurut MOHR, 2007

Q Ratio tipe iklim Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo dapat dihitung berdasarkan tabel di atas.

$$\begin{aligned}
 QRatio &= \frac{\sum Rata - RataBulanKering}{\sum Rata - RataBulanBasah} \times 100\% \\
 &= \frac{3.8}{6.8} \times 100\% \\
 &= 55.88\%
 \end{aligned}$$

Q Ratio yang diperoleh sebesar 55.88 %, maka dapat ditentukan tipe iklim Desa Benteng Lompoe adalah termasuk tipe iklim C. Dimana pembagian tipe iklim menurut Schmidt dan Fergusson dengan Q Ratio 33.3%- 60.0% adalah tipe iklim C dengan kriteria agak basah..

## B. Keadaan Sosial Ekonomi

### 1. Penduduk

Data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistika Propinsi Sulawesi Selatan mengenai jumlah penduduk Desa Benteng Lompoe sampai akhir tahun 2006 tercatat sebanyak 1500 jiwa yang terdiri dari 737 jiwa pria dan 763 jiwa wanita dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 337 KK. Lebih jelasnya jumlah penduduk menurut tingkat umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3 .

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Jiwa)
1	< 5	49	52	101
2	5-9	66	70	136
3	10-14	95	90	185
4	15-19	103	105	208
5	20-24	75	82	157
6	25-29	67	61	128
7	30-34	59	68	127
8	35-39	57	48	105
9	40-44	38	45	83
10	45-49	25	38	63
11	50-54	51	47	98
12	55-59	31	34	65
13	60-64	13	14	27
14	65 <	8	9	17
	Jumlah	737	763	1500

Sumber: Badan Pusat Statistika Poropinsi Sulawesi Selatan, 2007.

Tabel 3 memperlihatkan bahwa, jumlah penduduk Desa Benteng Lompoe yang terbesar adalah pada kelompok umur 15 – 19 tahun sebanyak 208 jiwa, sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit terdapat pada kelompok umur 65 < yaitu sebanyak 17 jiwa.

## 2. Mata Pencaharian

Sebagian besar penduduk Desa Benteng Lompoe bermata pencaharian sebagai petani, selebihnya berprofesi sebagai pedagang, PNS, tukang kayu, tukang ojek, montir. Lebih jelasnya uraian mengenai mata pencaharian penduduk Desa Benteng Lompoe dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Jumlah Kepala Keluarga Menurut Mata Pencaharian Penduduk Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.

No	Pekerjaan/Usaha	Jumlah (Jiwa)	Persentase (%)
1	Petani	282	83.68
2	PNS	9	2.67
3	Pedagang	25	7.42
4	Tukang Kayu	9	2.67
5	Tukang Ojek	10	2.97
6	Bengkel	2	0.59
	Jumlah	337	100

Sumber : Badan Pusat Statistika Propinsi Sulawesi Selatan, 2007.

Tabel 4 dapat memberikan gambaran bahwa pada umumnya penduduk Desa Benteng Lompoe mempunyai pekerjaan utama sebagai petani, yaitu sejumlah 282 jiwa (83,68 %). Hal ini disebabkan daya dukung lingkungan yang memungkinkan mereka untuk bertani. Sedangkan yang paling sedikit adalah penduduk yang bermata pencaharian dengan membuka usaha bengkel yakni sebanyak 2 jiwa (0,59%), usaha bengkel ini tersebar di dua dusun yang ada di Desa Benteng Lompoe yakni Dusun Massappa dan Dusun Tobako.

### 3. Pendidikan

Tingkat pendidikan penduduk sangat penting karena dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dalam memanfaatkan peluang untuk berusaha. Sebab semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula cara berpikirnya dan lebih mudah dalam menerima inovasi dan teknologi baru. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan di Desa Benteng Lompoe dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	243	16.20
2	Tidak Tamat SD	341	22.73
3	Tamat SD	599	39.93
4	Tamat SLTP/ sederajat	236	15.73
5	Tamat SLTA/ sederajat	77	5.13
6	D2/D3	0	0.00
7	S1	4	0.27
		1500	100

Sumber : Badan Pusat Statistika Propinsi Sulawesi Selatan, 2007

Tabel 5 dapat memperlihatkan bahwa, tingkat pendidikan di Desa Benteng Lompoe masih tergolong rendah. Hal tersebut dapat dilihat pada jumlah penduduk yang hanya tamat SD masih sangat banyak, yaitu sejumlah 221 jiwa (%). Sedangkan penduduk yang berhasil menamatkan pendidikannya sampai ke perguruan tinggi mempunyai jumlah yang paling sedikit yaitu sejumlah 4 jiwa (%). Hal tersebut terjadi karena penduduk desa menganggap bahwa pendidikan sama sekali bukan prioritas utama tetapi yang utama adalah bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

#### 4. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana guna menunjang kehidupan masyarakat Desa Benteng Lompoe dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana yang terdapat di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	TK	-
2	SD	2
3	Madrasah	1
4	Kantor Desa	1
5	Masjid	4
6	Posyandu	-
7	Pasar	-
8	Poskamling	6
9	Jalan Desa	4 km
10	Angkutan	19
	Jumlah	33

Sumber :Badan Pusat Statistika Propinsi Sulawesi Selatan, 2007.

#### 5. Tata Guna Lahan

Pola penggunaan lahan di Desa Benteng Lompoe dibedakan menjadi lahan untuk sawah, pekarangan dan tempat tinggal, kebun, ladang, serta lahan kritis. Berikut disajikan tabel tata guna lahan di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.



Tabel 7. Tata Guna Lahan di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.

No	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (ha)	Persentase (%)
1.	Sawah	466.05	56.70
2.	Pekarangan dan Tempat Tinggal	20.10	2.45
3.	Ladang	156.25	19.01
4.	Kebun	79.20	9.64
5.	Lahan Kritis	100.40	12.21
Jumlah		822.00	100.00

Sumber : Badan Pusat Statistika Propinsi Sulawesi Selatan, 2007.

Tabel 7 dapat memperlihatkan bahwa di Desa Benteng Lompoe, terdapat lahan kritis sebesar 12.21 % dengan luas 100.40 ha, lahan untuk sawah sebesar 56.70 % dengan luas 466.05 ha, ladang sebesar 19.07 % dengan laus 156.25 ha, kebun sebesar 9.64 % dengan luas 79.20 ha serta lahan yang digunakan untuk pekarangan dan tempat tinggal sebesar 2.45 % dengan luas 20.10 ha.

## V. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Identitas Responden

#### 1. Umur

Umur adalah jangka waktu dalam tahun mulai dari tahun kelahiran sampai saat penelitian ini dilaksanakan. Umur merupakan salah satu identitas yang dapat mempengaruhi kemampuan kerja dan pola pikir seseorang. Melalui umur dapat diketahui kemampuan dan pengalaman seseorang. Pada umumnya responden yang berumur muda mempunyai kondisi fisik yang sehat dan mampu menerima dengan cepat inovasi maupun ide-ide baru yang dianjurkan dibanding dengan petani yang berumur tua, namun semakin tua umur seseorang, maka semakin banyak pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh orang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, responden yang termuda adalah 27 tahun dan tertua adalah 60 tahun. Penggolongan umur responden dibagi menjadi 3 kelompok yang didasarkan pada penggolongan usia produktif dan non produktif. Usia produktif dibagi lagi menjadi 2 yaitu usia produktif muda dengan penggolongan umur 15-34 tahun, dan usia produktif tua dengan penggolongan umur 36-54 tahun. Umur 55 tahun keatas disebut umur yang tidak produktif. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 . Distribusi Umur Petani Responden pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, 2007.

No.	Kategori Umur	Responden	
		Frekuensi	Persentase
1.	Tidak Produktif (> 54 tahun )	1	3.33 %
2.	Umur Tua ( 35 – 54 tahun )	21	70 %
3.	Umur Muda ( 15 – 34 tahun)	8	26.67 %
Jumlah		30	100 %

Tabel 8 dapat menunjukkan bahwa jumlah responden yang digolongkan dalam kelompok umur 15-34 tahun jumlahnya adalah 8 orang (26.67%), kelompok umur 35-54 tahun jumlahnya adalah 21 orang (70%), dan kelompok umur lebih dari 54 tahun dengan jumlah 1 orang (3.33%). Hal ini menunjukkan bahwa gambaran responden tergolong usia muda dan masih sangat produktif dalam mengelola lahan yang mereka miliki.

Selain itu dengan usia terserbut, maka kemampuan fisik responden dalam melakukan usaha tani masih sangat berpengaruh khususnya dalam melakukan pemanfaatan hutan dan lahan. Berdasarkan angka tersebut maka kemungkinan dalam melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan tempat penelitian dapat berjalan dengan baik.

## 2. Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan adalah jangka waktu pendidikan formal yang ditempuh oleh responden. Tingkat pendidikan mempengaruhi seseorang dalam kemampuan berfikir, memahami arti pentingnya kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan mencari solusi atau pemecahan masalah. Tingginya tingkat pendidikan responden diklasifikasikan dalam 3 kategori: Pendidikan rendah, dimana mereka yang belum pernah sekolah dan yang tamat SD. Pendidikan menengah: mereka yang menamatkan pendidikannya pada jenjang SMP dan SMA. Dan pendidikan tinggi: mereka yang menamatkan pendidikannya pada jenjang Diploma dan Perguruan Tinggi.

Tabel 9. Distribusi Tingkat Pendidikan Petani Responden pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, 2007

No.	Kategori Tingkat Pendidikan	Responden	
		Frekuensi	Persentase
1.	Tinggi ( Akademi/PT )	0	0
2.	Sedang ( SMP-SMA )	4	13.33 %
3.	Rendah ( Tidak sekolah – SD )	26	86.67 %
Jumlah		30	100 %

Tabel 9 dapat menunjukkan bahwa responden yang tidak sekolah dan tamat SD menempati urutan tertinggi pada desa tempat penelitian ini berlangsung yaitu 26 orang (86.67%) dari seluruh total responden. Sementara itu responden yang tingkat pendidikannya SMP dan SMA berjumlah 4 orang (13.33%), dan responden yang tingkat pendidikannya Perguruan Tinggi (PT) tidak ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Benteng Lompoe

masih sangat rendah, dimana kondisi ini dapat berpengaruh terhadap rendahnya tingkat partisipasi responden dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

### 3. Tanggungan Keluarga

Jumlah tanggungan adalah banyaknya anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah dengan responden atau berada di luar rumah dan menjadi tanggung jawab responden. Besarnya tanggungan keluarga seseorang akan mempengaruhi prestasi kerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan keluarga. Jumlah tanggungan keluarga petani responden dibagi tiga kategori yaitu tanggungan keluarga kategori tinggi (>5 orang), sedang (3-5 orang), dan kategori rendah atau 0 – 2 orang (Dahlan, 2002).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 53.33 % petani responden mempunyai jumlah tanggungan keluarga sedang, disusul petani dengan kategori tinggi sebanyak 40 %, dan yang paling rendah adalah petani dengan jumlah tanggungan keluarga kategori rendah sebanyak 6.67% . Jumlah tanggungan keluarga petani responden pada kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo dapat dilihat pada Tabel 10 .

Tabel 10. Distribusi Jumlah Tanggungan Keluarga Petani Responden pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.

No.	Kategori Tanggungan Keluarga	Responden	
		Frekuensi	Persentase
1.	Tinggi (> 5 orang)	12	40.00
2.	Sedang (3 – 5 orang)	16	53.33
3.	Rendah (0 – 2 orang)	2	6.67
	Jumlah	30	100.00

#### 4. Pendapatan Responden

Pendapatan merupakan besarnya penghasilan responden yang diperoleh dari pekerjaan yang ditekuninya dalam satu tahun. Pendapatan yang tinggi baik langsung maupun tidak langsung dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang sehat, karena semakin memampukan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan. Untuk mengetahui tingkat pendapatan responden di lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Distribusi Tingkat Pendapatan Petani Responden pada Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Benteng Lomnope Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.

No	Pendapatan per Tahun	Frekuensi	Persentase
		0	0
1.	< 5 Juta	17	56.67
2.	5 Juta – 9 juta	13	43.33
3.	> 9 Juta		
	Jumlah	30	100.00

Tabel 11 dapat memperlihatkan bahwa, jumlah responden yang mempunyai pendapatan Rp 5.000.000 – Rp 9.000.000 adalah yang terbanyak dengan jumlah 17 responden atau 56.67 %, dan pendapatan responden diatas Rp. 9.000.000 13 responden atau 43.33 %. Sedangkan pendapatan responden kurang dari Rp 5.000.000 tidak ada.

### 5. Luas Lahan

Lahan yang digarap oleh responden di Desa Benteng Lompoe adalah lahan di luar kawasan hutan dan merupakan lahan milik yang dibebani pajak. Lahan garapan responden berupa areal persawahan. Sawah ditanami dengan komoditas padi dengan dua kali panen pertahun. Selain itu petani juga menanam sawahnya dengan tanaman semusim seperti kacang tanah, jagung dan sayur-sayuran. Hal ini dilakukan apabila sawahnya tidak sedang ditanami padi. Untuk lebih jelasnya berapa luas lahan garapan responden dapat dilihat pada Tabel 12 berikut ini.

Tabel 12. Distribusi Luas Lahan Petani Responden di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.

No	Luas Lahan (ha)	Frekuensi	Persentase (%)
1.	<0.5	0	0
2.	0.5 – 1.5	19	63.33
3.	>1.5	11	36.67
Jumlah		30	100.00

Tabel 12 menunjukkan bahwa sebagian besar responden hanya memiliki sawah antara 0.5 – 1.5 ha sejumlah 19 responden atau 63.33 %, yang memiliki luas lahan lebih dari 1.5 ha sejumlah 11 orang atau 36.67 %, dan yang memiliki luas lahan kurang dari 0.5 ha tidak ada.

### 6. Intensitas Penyuluhan

Yang dimaksud dengan intensitas penyuluhan disini dapat berupa penyuluhan pertanian dan penyuluhan kehutanan yang dilakukan oleh PPL, baik dari pertanian maupun kehutanan serta kelompok-kelompok tani, sebagaimana bentuk bimbingan teknis kepada petani. Rata-rata intensitas penyuluhan yang dilakukan oleh PPL hanya 1 – 2 kali per tahun, dan biasanya dilakukan pada waktu musim tanam dan saat ada proyek yang akan dilaksanakan. Untuk lebih jelasnya mengenai intensitas penyuluhan oleh responden dapat dilihat pada Tabel 13 .

Tabel 13. Klasifikasi Frekuensi Penyuluhan Responden di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo

No	Frekuensi (x)	Jumlah	Persentase (%)
1.	Tidak pernah	0	0
2.	1 – 2 x	25	83.33
3.	> 2x	5	16.67
Jumlah		30	100

Tabel 13 memberikan gambaran bahwa petani cenderung mengikuti dan menghadiri penyuluhan sebanyak 1-2 kali dengan jumlah 25 responden (83.33 %), dan petani yang mengikuti penyuluhan lebih dari tiga kali hanya 5 responden (16.67%). Sementara yang tidak pernah mengikuti penyuluhan tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat masih merasakan akan pentingnya



mengikuti penyuluhan. Sementara itu dapat pula dilihat bahwa frekuensi penyuluhan di desa tersebut masih rendah karena petugas PPL jarang berada di desa tersebut untuk memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa.

## **B. Partisipasi masyarakat**

### **1. Partisipasi dalam Perencanaan**

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang menentukan arah pelaksanaan program . Ada 3 kegiatan yang diteliti berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan yakni penyusunan rencana kegiatan, survei lapangan, dan pengajuan usul dan saran pada rapat atau pertemuan kelompok. Bila sejak awal petani dilibatkan dan berpartisipasi dalam perencanaan akan membuat masyarakat mengetahui seluk beluk program Rehabilitasi Hutan dan Lahan sehingga dapat menimbulkan rasa memiliki terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Tingkat partisipasi petani dalam perencanaan kegiatan reboisasi di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Partisipasi Responden dalam Perencanaan Kegiatan

No	Komponen Kegiatan	Tingkat Partisipasi						Jumlah
		Rendah		Sedang		Tinggi		
		F	%	F	%	F	%	
1.	Penyusunan rencana kegiatan	23	76.67	7	23.33	0	0	30
2.	Kegiatan Penentuan Lokasi Kegiatan	23	76.67	7	23.33	0	0	30
3.	Pengajuan usul dan saran	21	70	9	30	0	0	30
Rata-rata		22	74.45	8	25.55	0	0	30

Hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan kegiatan reboisasi di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo menunjukkan bahwa kegiatan perencanaan kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Partisipasi petani responden pada kegiatan perencanaan berada pada kategori rendah sebesar 74.45% dan yang tergolong dalam kategori sedang sebesar 25.55%, sedangkan yang tergolong dalam kategori tinggi tidak ada.

Kurangnya partisipasi petani responden dalam kegiatan perencanaan terutama disebabkan karena kegiatan perencanaan lebih banyak ditentukan oleh pihak penyelenggara proyek atau pemerintah. Masyarakat masih belum dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan baik mengikuti pertemuan-pertemuan perencanaan kegiatan reboisasi maupun proses pengambilan keputusan. Kinerja perencanaan yang kurang partisipatif ini dapat menimbulkan beberapa masalah misalnya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan kegiatan reboisasi tidak

maksimal karena sebagian belum sesuai dengan kebutuhan atau keinginan utamanya.

## 2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan reboisasi di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, dapat dilihat dari keikutsertaan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan mulai dari pembersihan lahan, pengangkutan bibit, pembuatan lubang, penanaman, dan pemeliharaan. Dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai pelaksana kegiatan RHL sangat diperlukan dan menjadi faktor penentu kelancaran dan keberhasilan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan reboisasi di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Partisipasi Responden Dalam Pelaksanaan Kegiatan

No	Komponen Kegiatan	Tingkat Partisipasi						Jumlah
		Rendah		Sedang		Tinggi		
		F	%	F	%	F	%	
1.	Pembersihan Lahan	12	40	10	33.33	8	26.67	30
2.	Pengangkutan bibit	7	23.33	5	16.67	18	60	30
3.	Pembuatan Lubang	5	16.67	8	26.67	17	56.67	30
4.	Penanaman	5	16.67	8	26.67	17	56.67	30
5.	Pemeliharaan	9	30	9	30	12	40	30
Rata-rata		8	25.33	8	26.67	14	48.02	30

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan reboisasi di Desa Benteng Lompoe menunjukkan tingkat partisipasi petani responden yang cukup tinggi. Partisipasi petani yang tergolong dalam kategori rendah sebesar 25.33 %, kategori sedang 26.67 % dan yang tergolong dalam kategori tinggi 48.02 %. Tingginya tingkat partisipasi responden disebabkan karena masyarakat pada umumnya mempunyai kepentingan terhadap kegiatan yang akan dilakukan, yaitu untuk mendapatkan penghasilan (upah) sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam anggaran kegiatan. Selain itu petani juga menginginkan bibit tanaman yang akan ditanam di lahan mereka sendiri untuk dipelihara, dengan harapan bahwa mereka dapat meningkatkan produksi dari lahan mereka

### **3. Partisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi**

Fase terakhir dari proses partisipasi masyarakat dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah pemantauan (monitoring) dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi merupakan suatu kegiatan kontrol pada saat pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui proses dan perkembangan kegiatan tersebut. Keberhasilan suatu program tidak hanya di evaluasi oleh pelaksana penginisiatif sendiri, namun petani sebagai pelaku dan penerima manfaat dari program tersebut juga mempunyai peranan dalam mengevaluasi dan mengetahui sejauh mana perkembangan dan kemajuan menurut kriteria yang diharapkan. Tingkat partisipasi petani responden dalam kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Desa Benteng Lompoe dapat disajikan pada Tabel 17.

Tabel 17. Partisipasi Responen dalam Kegiatan Monitorig dan Evaluasi

No	Komponen Kegiatan	Tingkat Partisipasi						Jumlah
		Rendah		Sedang		Tinggi		
		F	%	F	%	F	%	
1.	Pemantauan pelaksanaan kegiatan	21	70	6	20	3	10	30
2.	Evaluasi pelaksanaan	22	73.33	4	13.33	4	13.33	30
Rata-rata		21	71.65	6	16.65	4	11.66	30

Dari Tabel 17 diatas memberikan gambaran bahwa responden yang ikut berpartisipasi dalam tahap monitoring dan evaluasi program reboisasi dengan kategori rendah sebesar 71.65 % dari 30 responden, sedang 16.65 %, dan tingkat partisipasi dengan kategori tinggi 11.66 %.. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kurangnya partisipasi petani responden dalam kegiatan monitoring dan evaluasi disebabkan karena adanya pemahaman masyarakat bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi adalah merupakan pekerjaan pemerintah atau yang menengani proyek RHL tersebut. Selain itu petani juga mempunyai kesibukan lain sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi lebih banyak dilakukan oleh ketua kelompok tani serta tokoh-tokoh masyarakat yang dilakukan bersama petugas yang ada. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan komponen yang kurang mendapat perhatian dari petani pelaksana kegiatan reboisasi.

### 3. Partisipasi Kelompok Tani dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Dalam penelitian ini partisipasi dilihat dari keterlibatan langsung masyarakat petani dalam kegiatan rehabilitasi hutan lahan, yang ditunjukkan oleh keterlibatan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Sesuai dengan yang diungkapkan Cohen dan Uphoff (1997) dalam Imran (2003), maka tingkat partisipasi dikatakan tinggi apabila petani terlibat dalam keempat proses kegiatan tersebut (perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan Monev) dengan skor >25. Tingkat partisipasi sedang apabila petani hanya terlibat dalam proses pelaksanaan, penerimaan manfaat dan monev dengan skor 20 – 25. Dan tingkat partisipasi rendah apabila petani hanya menerima manfaat dan mengikuti kegiatan monev dengan skor <20. Untuk klasifikasi tingkat partisipasi seluruh responden dan keempat aspek kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan dapat dilihat pada Tabel 18 berikut ini :

Tabel 18. Klasifikasi Partisipasi Responden di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo.

No	Kategori	Jumlah	Persentase (%)
1.	Rendah	18	60
2.	Sedang	5	16.67
3.	Tinggi	7	23.33
Jumlah		30	100

Tabel 18 memperlihatkan bahwa, tingkat partisipasi petani responden masih terkategori rendah dengan jumlah 18 responden atau 60 % , sedangkan kategori sedang hanya 5 responden atau 16.67 % , dan yang termasuk kategori tinggi sebanyak 7 responden atau 23.33 % . Hal ini nampak bahwa tingkat

partisipasi petani responden dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo masih rendah.

### **C. Analisis Hubungan antara Faktor Sosial Ekonomi dengan Partisipasi Terhadap Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan**

Hubungan antara faktor sosial ekonomi (variabel independen) yang terdiri dari umur, pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pendapatan responden dan luas lahan dengan partisipasi kelompok tani dalam kegiatan rehabilitasi hutan lahan , dianalisis dengan Uji Chi Kuadrat ( $X^2$ ) sebagaimana disajikan pada lampiran 3 sampai lampiran 8. Sedangkan rekapitulasi hasil analisis hubungan antara faktor sosial ekonomi dengan partisipasi dalam kegiatan RHL di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo, dapat dilihat pada Tabel 19

Tabel 19. Hasil Analisis Hubungan antara Faktor Sosial Ekonomi dengan Partisipasi Kelompok Tani dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo

No.	Faktor social Ekonomi	Derajat bebas (db)	Chi-kuadrat ( $X^2$ -hitung)	$X^2$ -tabel 0,95	Keterangan
1.	Umur	4	6.74	9.49	Tidak Nyata
2.	Pendidikan	4	11.54	9.49	Nyata
3.	Tanggungan Keluarga	4	3.35	9.49	Tidak nyata
4.	Pendapatan responden	4	1.135	9.49	Tidak nyata
5.	Luas Lahan	4	18.81	9.49	Nyata
6.	Intensitas Penyuluhan	4	10.73	9.49	Nyata

Adapun pembahasan dari masing-masing faktor sosial ekonomi tersebut diuraikan sebagai berikut :

### 1. Umur

Berdasarkan hasil analisis Chi Kuadrat seperti yang terlihat pada Tabel 19 diketahui bahwa hubungan umur dengan partisipasi terhadap kegiatan RHL memiliki nilai  $X^2$  hitung 6.74 sedangkan nilai  $X^2$  tabel (0.95) untuk derajat bebas 4 adalah 9.49. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa faktor umur tidak memiliki hubungan yang nyata dengan tingkat partisipasi dalam kegiatan RHL.



## 2. Pendidikan

Hasil analisis hubungan tingkat pendidikan responden dengan partisipasi dalam kegiatan RHL di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo seperti yang terlihat pada Tabel 19 diatas diperoleh nilai  $X^2$  hitung sebesar 11.54 lebih besar dari  $X^2$  tabel (0.95) dengan derajat bebas 4 sebesar 9.49. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki hubungan yang nyata dengan partisipasi petani dalam kegiatan RHL. Pada umumnya tingkat pendidikan responden adalah belum tamat SD dan tamat SD yaitu 86.67 % (26 responden) dan yang berpendidikan SMP sampai SMA 13.33% (4 responden), sedangkan yang tamat Perguruan Tinggi tidak ada. Rendahnya tingkat pendidikan responden mengakibatkan rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan manfaat dari kegiatan RHL, khususnya dalam pelestarian hutan dan lahan untuk kebutuhan pertanian dan kebutuhan lainnya, seperti penebangan kayu, sehingga menyebabkan partisipasi petani dalam kegiatan RHL menjadi rendah.

## 3. Tanggungan Keluarga

Hasil analisis hubungan tanggungan keluarga dengan tingkat partisipasi dalam kegiatan RHL di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo seperti yang terlihat pada Tabel 19 di atas diperoleh nilai  $X^2$  hitung sebesar 3.35 lebih kecil dari  $X^2$  tabel (0.95) dengan derajat bebas 4 sebesar 9.49. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jumlah tanggungan keluarga mempunyai hubungan yang tidak nyata dengan tingkat partisipasi masyarakat terhadap kegiatan RHL. Besar kecilnya tanggungan keluarga bukan merupakan

jaminan tinggi rendahnya partisipasi masyarakat dalam program RHL. Masing-masing anggota keluarga mempunyai tugas dan fungsi yang berlainan, kenyataan menunjukkan bahwa anak-anak atau yang menjadi tanggungan keluarga sepulang dari beraktifitas telah mempunyai rutinitas yaitu membantu orang tua di sawah dan di rumah.

#### **4. Pendapatan Responden**

Hasil analisis tingkat pendapatan pada Tabel 19 diatas, diketahui bahwa nilai  $X^2$  Hitung sebesar 1.135 lebih kecil dari nilai  $X^2$  tabel (0.95) dengan derajat bebas 4 sebesar 9.49. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa antara tingkat pendapatan responden dengan partisipasi terhadap kegiatan RHL di tempat penelitian mempunyai hubungan yang tidak nyata. Artinya tidak terdapat pengaruh perbedaan antara petani yang berpendapatan < Rp. 5.000.000 per tahun, dengan Rp 5.000.000 – Rp. 10.000.000 pertahun dan > Rp 10.000.000 pertahun dalam partisipasi pada kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

#### **5. Luas Lahan**

Hasil analisis luas lahan pada Tabel 19 diatas menunjukkan bahwa nilai  $X^2$  hitung sebesar 18.81 lebih besar dari  $X^2$  tabel (0.95) dengan derajat bebas 4 sebesar 9.49. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa antara luas lahan garapan responden dengan partisipasi terhadap kegiatan RHL di tempat penelitian mempunyai hubungan yang nyata. Dengan kata lain terdapat perbedaan yang nyata antara petani yang mempunyai lahan yang luas cenderung lebih aktif dalam pelaksanaan kegiatan RHL, disbanding dengan yang mempunyai lahan yang

sempit. Semakin luas lahan garapan yang dikelola, semakin besar pula kecenderungan untuk berpartisipasi dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

#### **6. Intensitas Penyuluhan**

Hasil analisis intensitas penyuluhan pada Tabel 19 di atas menunjukkan bahwa nilai  $X^2$  Hitung sebesar 10.73 lebih besar dari nilai  $X^2$  Tabel (0.95) dengan derajat bebas 4 sebesar 9.49. Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa semakin seringnya responden mengikuti kegiatan penyuluhan, maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuan dan pemahaman petani terhadap kegiatan RHL. Artinya hal ini akan mendorong semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL yang dilaksanakan.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Benteng Lompoe serta kegiatan monitoring dan evaluasi tergolong dalam kategori rendah, sedangkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan RHL tergolong tinggi
2. Partisipasi masyarakat dalam seluruh tahapan proses kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo masih sangat rendah. Partisipasi masyarakat secara signifikan sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, luas lahan garapan dan intensitas penyuluhan.
3. Faktor umur, Jumlah tanggungan keluarga dan pendapatan responden mempunyai hubungan yang tidak nyata dengan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring dan evaluasi.

## B. Saran

1. Perencanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan seharusnya dilakukan secara partisipatif dengan melakukan pertemuan dengan kelompok tani dan pemerintah setempat, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
2. Dalam melakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan hendaknya melakukan penanaman tanaman yang hasilnya juga dapat dimanfaatkan masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adjid, D.A. 1985. *Pola Partisipasi Masyarakat Pedesaan dalam Pembangunan Berencana*. Orba Sakti. Bandung.
- Alam Setia Zain, S.H, 1998. *Kamus Kehutanan*. PT. Rineke Cipta. Jakarta.
- Alidinar, T. 1986. *Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Propinsi Sumatra Barat*. Tesis Magister FPS IPB- Universitas Andalas. Bogor.
- Anna, S., 2001. *Model Pengelolaan Kawasan Daerah Aliran Sungai dan Kawasan Pesisir secara Terpadu*. Makalah Filsafat Sains, Program Pasca Sarjana IPB. Bogor.
- Asdak Chay, 1995. *Hidrologi dan Pengelolaan Aliran Sungai*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Badrun, H, 1993. *Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Kelompok Tani dalam Pembangunan Perkebunan*. Direktorat Jenderal Perkebunan, Bina Penyuluhan Perkebunan.
- BPDAS Jeneberang-Walanae, 2006. *Kondisi Lahan Kritis Kabupaten Wajo*. <http://www.bpdas-jeneberang.net/bk%20gn%20@/wajo%20GNRHL%20BOOK.htm>, [Diakses 15 Desember 2006].
- Conyers, D. 1981. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Gama University Press, Yogyakarta.
- Dahlan, L.M. 2002. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan*. Tesis Program Pascasarjana. SSP. Universitas Hasanuddin, Makassar. Tidak diterbitkan.
- Departemen Kehutanan. 1992. *Petunjuk Teknis Pembinaan Kelompok Tani Hutan Rakyat*. Proyek Pengembangan dan Pengelolaan Hutan Rakyat Sulawesi Selatan Tahun 1992/1993, Ujung Pandang.
- , 1999. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Kehutanan*. Jakarta.
- , 2001. *Kepmen No. 25/KPTS. II/2001 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Departemen Kehutanan*, Jakarta

-----, 2003. *Penyusunan Rencana Teknik Lapangan Rehabilitasi Lahan dan Konservasi Tanah Daerah Aliran Sungai (DAS) Jeneberang Propinsi Sulawesi Selatan*. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial BP DAS Jeneberang Walanae, Makassar.

Harjonigeo, S. 1991. *Pola Partisipasi Masyarakat Pedesaa dalam Pembangunan Berencana*. IPB, Bogor.

Imran, N. 2003. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pegelolaan DAS Maros Bagian Hulu Kabupaten Maros*. Tesis Program Pasca Sarjana, Unhas Makassar.

Karyawan, K. A., I. Racchmawati dan M. Sinaga, 1996. *Persepsi Masyarakat dalam Kegiatan Konservasi Tanah dan Air. Studi Kasus di Daerah Tangkapan Waduk Wonogiri*. Buletin DAS Vol. III No. 1 BTP DAS Surakarta, Jawa Tengah.

Kuswata, R. A. 1993. *Manajemen Pembangunan Desa. Pedoman Program Terpadu*. Grafindo Utama, Jakarta.

Mishra, S.N. 1984. *Participatio and Development*. NBO Publisher Distributor, New Delhi.

Mubyarto dan Kartodirdjo, 1994. *Keswadayaan Masyarakat Desa Tertinggal*. Aditya. Media P3PK UGM Yogyakarta.

Paembonan, S. 1998. *Review Rencana Teknik Lapangan RLKT DAS Bila Propinsi Sulawesi Selatan*. Buku I (Laporan Utama). Direktorat Rehabilitasi dan Konservasi Tanah, Jakarta.

-----, S. 1982. *Disertasi Analisis Sistem Biofisik DAS. Studi Kasus DAS Saddang di Sulawesi Selatan*. Fakultas Pascasarjana IPB Bogor.

Polak, J. A.B.F. Mayor, 1997. *Sosiologi Suatu Pengantar Ringkas*. Ikhtiar Baru, Jakarta.

Rahardjo, 1999. *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Rheynald Rhommy, M>M, 2002. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Saddang Hilir Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan*. Tesis PPS Unhas, Makassar.

Ridwan, 2002. *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. PT Alfabeta, Bandung

- Sallatang, Arifin. 2002. *Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Buletin Penelitian Vol. IV. Lembaga Penelitian Unhas, Makassar.
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Sebelas Maret University Press, Yogyakarta.
- Sihombing, M. 1980. *Partisipasi Sebagai Pemerdakaan Manusia*, Majalah Prisma II (IX) 31 – 40. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Jakarta.
- Soetrisno, L. 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Kanisius, Yogyakarta.
- Sudjana, 1996. *Metoda Statistika*. Tarsito. Bandung.
- Sukdan, 2004. *Volume Jurnal Hutan Rakyat VI No. 1*. Pusat Kajian Hutan Rakyat. Fakultas Kehutanan, UGM Yogyakarta.
- Suripin, 2002. *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*. Andi, Yogyakarta.
- Susanto. A. S. 1997. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Bina Cipta Bandung
- Tjokroamidjoyo, 1987. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. LP3ES.. Jakarta
- Triwilaida, Sukresno, Precylia, V. 1996. *Studi Karakteristik Tanah pada Lahan Berkas Tambang Batubara Karbon di Bukit Asam, Sumatera Selatan*. Jurnal Pengelolaan DAS Vol. II No. 4 : 5 – 12. BTP DAS Surakarta.



Tabel Skoring Tingkat Partisipasi Responden dalam Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo

No	Nama responden	Penyusunan	Penentuan Lokasi Kegiatan	Pengajuan Usul dan Saran	Pembersihan Lahan	Pengangkutan Bibit	Pembuatan Lubang Tanam	Penanaman	Pemeliharaan	Monitoring	Evaluasi	Tot	Ket
1	Tamrin	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	26	T
2	Nurman	1	1	1	2	3	2	2	1	1	1	15	R
3	Ab. Sennang	1	1	1	2	3	3	3	3	1	2	20	S
4	Baharuddin	1	1	1	1	3	2	3	1	1	1	15	R
5	Jawi	1	1	2	2	3	3	3	3	2	1	21	S
6	Baseri	1	1	1	1	3	3	3	2	1	1	17	R
7	Suardi	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	26	T
8	Laluwo	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	26	T
9	Nanuang	1	1	1	1	1	3	2	1	1	1	13	R
10	Abu P	1	1	1	2	3	1	1	2	1	1	14	R
11	H. Derwis	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	26	T
12	Subalis	1	1	1	1	3	3	3	1	1	1	16	R
13	Hamsah	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	13	R
14	Pallaco	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	26	T
15	Salih	1	1	1	1	1	2	1	2	1	1	12	R
16	Kibe'	1	1	1	2	1	3	3	3	1	1	17	S
17	Nuridin	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	12	R
18	Sule	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	26	T
19	Rustan	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	12	R
20	Tamin	1	1	1	2	2	1	2	2	1	1	14	R
21	Abd. Hafid	2	2	2	3	3	3	3	3	2	3	26	T
22	Anda	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	12	R
23	H. Talebe	1	1	1	2	2	1	2	1	1	1	13	R
24	Budiman	1	1	1	1	3	3	3	3	1	1	18	S
25	Nure	1	1	1	3	3	2	2	2	1	1	17	R
26	Palta	1	1	2	2	1	2	1	2	1	1	14	R
27	Juse	1	1	1	1	2	3	2	2	1	1	15	R
28	Rustan	1	1	1	2	3	3	3	3	2	1	20	S
29	Tahir	1	1	1	1	1	3	3	2	1	1	15	R
30	Beddu	1	1	1	1	3	1	3	1	1	1	14	R
	Jumlah	37	37	39	56	71	72	72	63	42	42	531	R
	Rata-rata	1.23	1.23	1.3	1.87	2.36	2.4	2.4	2.1	1.4	1.4	17.7	R

## Data Identitas Sosial Ekonomi Responden di Desa Benteng Lompoe Kecamatan Sabangparu Kabupaten Wajo

No	Nama Responden	Umur	Pendidikan	Tanggungan Keluarga	Pendapatan Usaha Tani (Rp)	Luas Lahan (Ha)	Intensitas Penyuluhan Pertanian
1	Tamin	40	SD	4	11000000	2.5	3
2	Nurman	27	SD	2	9800000	1.2	1
3	AB. Seinang	50	SMP	5	9500000	2	2
4	Bahanuddin	34	SD	4	10200000	1.5	1
5	Jawi	37	-	6	9500000	2	2
6	Baseri	45	-	4	9000000	1.2	1
7	Suzardi	35	-	7	10500000	2	2
8	Leluwu	32	-	6	8250000	2	2
9	Nanuang	50	-	5	7500000	1.3	1
10	Abu P	41	SD	4	6700000	1.5	1
11	H. Darwis	29	SD	7	10000000	2.5	3
12	Subais	54	SD	6	10200000	1	1
13	Hamsah	50	-	5	10150000	1.5	1
14	Pallaco	60	-	5	9700000	1.5	3
15	Salih	34	-	3	8500000	0.7	1
16	Kibef	40	SMP	8	8000000	1.2	1
17	Nurdin	40	-	5	9200000	1	1
18	Sufe	25	SD	5	8750000	2	3
19	Rustan	50	-	4	7500000	1.5	1
20	Tamin	32	-	6	7000000	0.8	2
21	Abd. Hafid	50	SD	8	8000000	2	2
22	Anda	45	SD	5	5350000	1.2	2
23	H. Talebe	50	SMP	4	7250000	1.2	1
24	Budiman	47	-	7	10000000	2	1
25	Nure	51	SD	6	9000000	1	1
26	Paiba	50	-	3	8000000	1	1
27	Juse	45	SD	5	9200000	2	1
28	Rustan	40	SMA	2	8000000	2	2
29	Tahir	35	-	6	9250000	1.5	1
30	Beddu	30	-	8	5200000	1.5	1
	Jumlah	1248		155	259200000	48.3	46
	Rata-rata	41.6		5.17	8640000	1.54	1.53

Keterangan

: Tidak tamat SD  
SD : Tamat dan berijazah SD  
SMP : Tamat dan berijazah SMP  
SMA : Tamat dan berijazah SMA

Lampiran 3  
 Analisis Hubungann antara Faktor Umur dengan Partisipasi

No	Partisipasi	15 - 34	35 - 54	>54	Jumlah
1.	Rendah	5 4,8	13 10,8	0 0,6	18
2.	Sedang	0 1,33	5 3,5	0 0,16	5
3.	Tinggi	3 1,86	3 4,9	1 0,23	7
	Jumlah	8	21	1	30

$$x^2 = \frac{(5-4.8)^2}{4.8} + \frac{(13-12.6)^2}{12.6} + \frac{(0-0.6)^2}{0.6} + \frac{(0-1.33)^2}{1.33} + \frac{(5-3.5)^2}{3.5} + \frac{(0-0.16)^2}{0.16} + \frac{(3-4.9)^2}{4.9} + \frac{(1-0.23)^2}{0.23}$$

$$x^2 = 6.74$$

$$X^2 \text{ tabel } (0,05; 4) = 9.49$$

Berarti  $X^2$  Hitung <  $X^2$  tabel, maka faktor umur tidak mempunyai hubungan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL.

Lampiran 4  
 Analisis Hubungan antara Faktor Pendidikan dengan Partisipasi

No	Partisipasi	$\leq SD$	SMP - SMA	Perguruan Tinggi	Jumlah
1.	Rendah	17	1	0	18
2.	Sedang	15.6	2.4	0	5
3.	Tinggi	2	3	0	7
		4.33	0.66	0	
		7	0	0	
		6.06	0.93	0	
	Jumlah	26	4	0	30

$$X^2 = \frac{(17-15.6)^2}{15.6} + \frac{(1-2.4)^2}{2.4} + \frac{(2-4.33)^2}{4.33} + \frac{(3-0.66)^2}{0.66} + \frac{(7-6.06)^2}{6.06} + \frac{(0-0.93)^2}{0.93}$$

$$X^2 = 11.54$$

$$X^2 \text{ tabel } (0.05 ; 4) = 9.49$$

Berarti  $X^2$  Hitung  $>$   $X^2$  Tabel, maka Faktor pendidikan mempunyai hubungan yang nyata dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL.

Lampiran 5  
 Analisis Hubungan antara Faktor Tanggungan Keluarga dengan Partisipasi

No	Partisipasi	> 5	3-5	0-2	Jumlah
1.	Rendah	5 7.2	12 9.6	1 1.2	18
2.	Sedang	3 2	1 2.67	1 0.33	5
3.	Tinggi	4 2.8	3 3.73	0 0.07	7
	Jumlah	12	16	2	30

$$X^2 = \frac{(5-7.2)^2}{7.2} + \frac{(12-9.6)^2}{9.6} + \frac{(1-1.2)^2}{1.2} + \frac{(3-2)^2}{2} + \frac{(1-2.67)^2}{2.67} + \frac{(1-0.33)^2}{0.33} + \frac{(4-2.8)^2}{2.8} + \frac{(3-3.73)^2}{3.73} + \frac{(0-0.07)^2}{0.07}$$

$$X^2 = 3.35$$

$$X^2 \text{ Tabel } (0.05; 4) = 9.49$$

Berarti  $X^2$  Hitung <  $X^2$  Tabel, maka Faktor tanggunga keluarga tidak mempunyai hubungan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL.

Lampiran 6  
Analisis Hubungan antara Faktor Pendapatan Responden dengan Partisipasi

No	Partisipasi	<Rp 5.000.000	Rp 5.000.000 – Rp 9.000.000	> Rp 9.000.000	Jumlah
1.	Rendah	0	11 10.2	7 7.8	18
2.	Sedang	0	3 2.83	2 2.16	5
3.	Tinggi	0	3 3.97	4 3.03	7
	Jumlah	0	17	13	30

$$X^2 = \frac{(11-10.2)^2}{10.2} + \frac{(7-7.8)^2}{7.8} + \frac{(3-2.83)^2}{2.83} + \frac{(2-2.16)^2}{2.16} + \frac{(3-3.97)^2}{3.97} + \frac{(4-3.03)^2}{3.03}$$

$$X^2 = 1.03$$

$$X^2 \text{ Tabel } (0.05 ; 4) = 9.49$$

Berarti  $X^2$  Hitung <  $X^2$  Tabel, maka Faktor pendapatan tidak mempunyai hubungan dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL..

Lampiran 7  
 Analisis Hubungan antara Faktor Luas Lahan dengan Partisipasi

No	Partisipasi	< 0.5	0.5 - 1.5	> 1.5	Jumlah
1.	Rendah	0	17 11.4	1 6.6	18
2.	Sedang	0	1 3.16	4 1.83	5
3.	Tinggi	0	1 4.43	6 2.56	7
Jumlah		0	19	11	30

$$X^2 = \frac{(17-11.4)^2}{11.4} + \frac{(1-6.6)^2}{6.6} + \frac{(1-3.16)^2}{3.16} + \frac{(4-1.83)^2}{1.83} + \frac{(1-4.43)^2}{4.43} + \frac{(6-2.56)^2}{2.56}$$

$$X^2 = 18.81$$

$$X^2 \text{ Tabel } (0.05 ; 4) = 9.49$$

Berarti  $X^2$  Hitung >  $X^2$  Tabel, maka Faktor luas lahan mempunyai hubungan yang nyata dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL.

Lampiran 8  
Analisis Hubungan antara Intensitas Penyuluhan dengan Partisipasi

No	Partisipasi	Tidak Pernah	1 - 2x	> 2x	Jumlah
1.	Rendah	0	18 15.6	0 3.64	18
2.	Sedang	0	5 4.33	0 0.67	5
3.	Tinggi	0	3 6.06	4 0.93	7
	Jumlah	0	26	4	30

$$X^2 = \frac{(18-15.6)^2}{15.6} + \frac{(0-3.64)^2}{3.64} + \frac{(5-4.33)^2}{4.33} + \frac{(0-0.67)^2}{0.67} + \frac{(3-6.06)^2}{6.06} + \frac{(4-0.93)^2}{0.93}$$

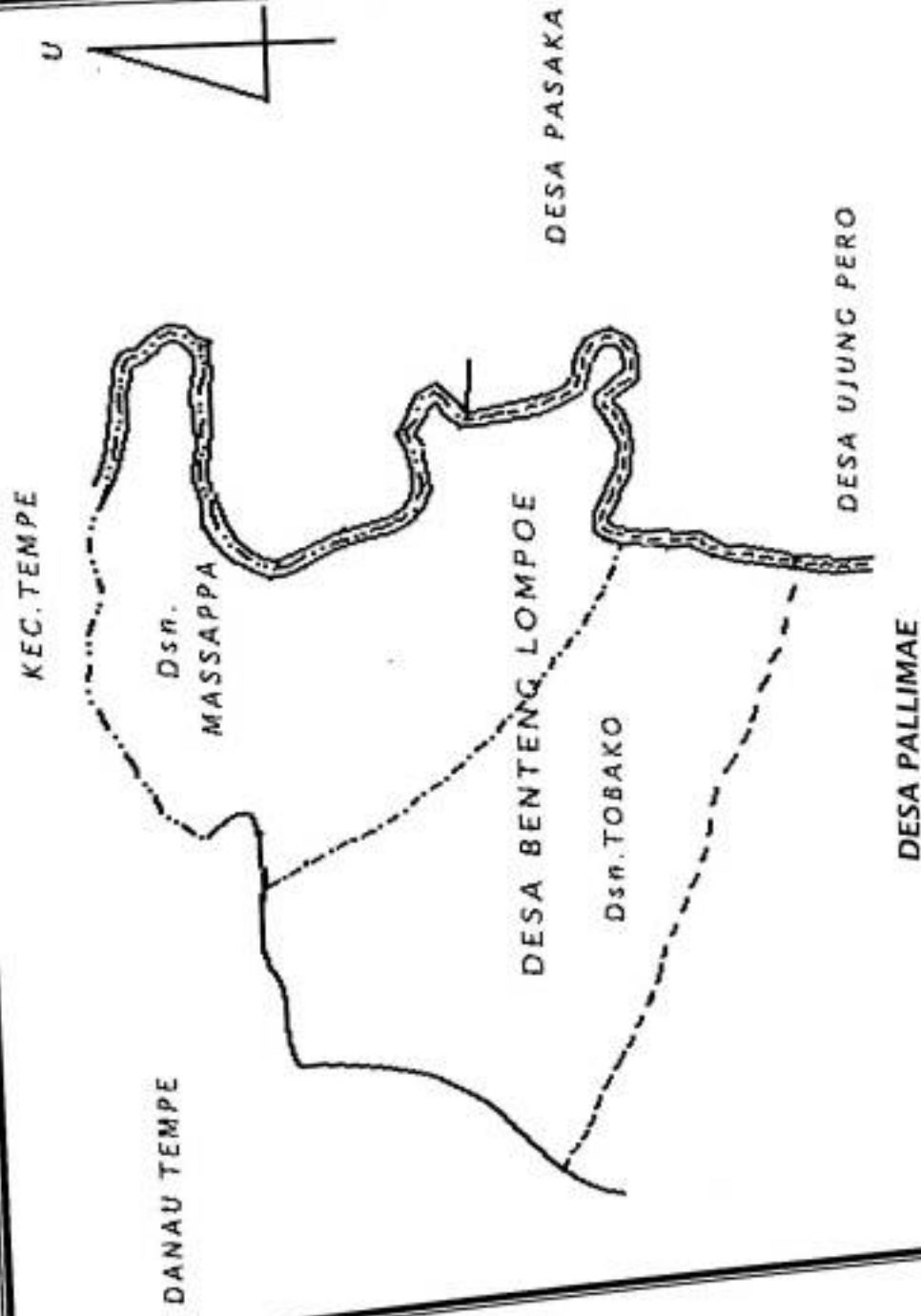
$$X^2 = 6.36$$

$$X^2 \text{ Tabel } (0.05; 4) = 9.49$$

Berarti  $X^2$  Hitung >  $X^2$  Tabel, maka Faktor intensitas penyuluhan mempunyai hubungan yang nyata dengan partisipasi masyarakat dalam kegiatan RHL.



### PETA DESA BENTENG LOMPOE KECAMATAN SABBANGPARU KABUPATEN WAJO



Keterangan :



Batas Kecamatan



Batas Desa



Batas Dusun



Danau



Sungai